

---

**IMPLEMENTASI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN  
SAMPAH ORGANIK BERBASIS EKONOMI SIRKULAR DI BALI****<sup>1</sup>Ni Komang Giska Ayu Princia, <sup>2</sup>Ni Wayan Widhiasthini, <sup>3</sup>Ni Luh Yulyana Dewi, <sup>4</sup>Ni  
Putu Bayu Widhi Antari**

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar

\*Email: [giskaayuprincia0204@gmail.com](mailto:giskaayuprincia0204@gmail.com)

---

**Abstract**

*Organic waste management in Tanjung Benoa, a coastal tourism area in Bali, faces complex challenges due to high waste volume from tourism activities, household consumption, and Hindu religious ceremonies. This study analyzes the realization of collaborative governance in organic waste management based on circular economy principles using the Collaborative Governance Regime (CGR) framework from Emerson, Nabatchi, and Balogh (2012). This qualitative descriptive research was conducted in Tanjung Benoa Traditional Village through in-depth interviews with key stakeholders, field observations, and document studies. The findings reveal that collaboration is driven by a conducive system context including tiered regulations, transformative leadership from Banjar, and free service incentives. The collaborative governance regime shows principled engagement through formal coordination and democratic forums, shared motivation built through subsidies and community trust, and joint action capacity supported by TPS3R infrastructure and government grants, despite limitations in land availability and service coverage. Positive impacts include reduced waste to landfills, community cost savings, and increased environmental awareness, although circular economy benefits have not been fully realized due to limited compost marketing systems. Adaptive capacity is demonstrated through funding diversification and processing innovations, though challenges remain in fluctuating community participation and limited private sector coordination. This research recommends strengthening institutional capacity, enhancing sustainable education, developing compost product marketing systems, and building formal partnerships with the private sector.*

**Sejarah Artikel**

Diterima: 27-11-2025

Ditinjau: 12-12-2025

Disetujui: 21-12-2025

**Keywords:** *collaborative governance; organic waste management; circular economy***How to Cite:** <sup>1</sup>Ni Komang Giska Ayu Princia, <sup>2</sup>Ni Wayan Widhiasthini, <sup>3</sup>Ni Luh Yulyana Dewi, & <sup>4</sup>Ni Putu Bayu Widhi Antari (2026). Implementasi Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Ekonomi Sirkular Di Bali. *Governance (Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik)*, vol 16 No. 01. <https://doi.org/10.38156/gikmp.v16i1.392>**PENDAHULUAN**

Provinsi Bali sebagai destinasi wisata internasional menghadapi permasalahan kompleks terkait pengelolaan sampah organik. Timbulan sampah di Bali tahun 2024 mencapai 1,2 juta ton, didominasi oleh sampah organik berupa sisa makanan (27,66%) dan kayu/ranting (38,2%). Sebagai destinasi wisata, timbulan sampah tidak hanya bersumber dari aktivitas rumah tangga masyarakat lokal, tetapi juga dari sektor pariwisata yang terus berkembang

pesat. Kondisi tersebut mendapat perhatian internasional, di mana menurut laporan berita dari (CNN Indonesia, 2024) salah satu publikasi panduan perjalanan menempatkan Bali dalam daftar destinasi yang tidak layak dikunjungi pada 2025 karena dinilai belum berhasil mengatasi persoalan persampahan.

Tanjung Benoa sebagai kawasan wisata bahari menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah organik. Volume sampah yang tinggi bersumber dari aktivitas rumah tangga, pariwisata, dan upacara adat berpotensi mencemari perairan dan mengganggu ekosistem bahari. Berdasarkan aturan yang ada melalui Pemerintah Provinsi Bali telah mengembangkan kerangka regulasi melalui (Peraturan Gubernur Bali, 2019) yaitu Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, yang kemudian diperkuat dengan Instruksi (Peraturan Gubernur Bali, 2021) Nomor 8324 Tahun 2021. Pada konteks lokal, Desa Adat Tanjung Benoa menerbitkan Pararem Nomor 12/PR/DA-TB/XI/2021 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Pemerintah Provinsi Bali, 2021) sebagai bentuk komitmen sosial masyarakat. Perarem merupakan aturan atau keputusan adat yang dibuat oleh Paruman Desa Adat di Bali sebagai turunan dari Awig-Awig (hukum adat utama) yang berfungsi untuk mengatur dan menyelesaikan sengketa adat, atau memberikan pedoman pelaksanaan adat sehari-hari di tingkat desa adat, seperti tata cara pemilihan pengurus desa adat atau pengelolaan anggota (krama) desa adat, sehingga memperkuat eksistensi dan kelestarian adat istiadat setempat. Namun, penerapan regulasi ini masih menghadapi hambatan di lapangan, terutama terkait koordinasi antar pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat.

Pada 26 Februari 2025, melalui laman Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa selaku Bupati Badung melakukan pemantauan intensif ke tiga TPS3R untuk mengevaluasi efektivitas teknologi pengolahan sampah, yang menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk akselerasi dan perbaikan sistem. Meskipun infrastruktur TPS3R (Tempay Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* telah tersedia, kebiasaan masyarakat untuk memilah sampah sebelum dibuang masih belum terbentuk secara konsisten. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas fisik saja tidak cukup tanpa adanya perubahan perilaku masyarakat dan perlu adanya transformasi pengelolaan sampah organik yang juga mengedepankan pendekatan kolaboratif pada pemangku kepentingan.

Tata Kelola Kolaboratif (*collaborative governance*) menjadi pendekatan strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah organik berbasis masyarakat melalui koordinasi multi-stakeholder. Menurut (Emerson, Nabatchi dan Balogh, 2012) *collaborative governance* merupakan proses dan struktur pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi konstruktif dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai secara sendiri-sendiri. Pendekatan ini relevan karena pengelolaan sampah memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal (Valentina *et al.*, 2025)

Penelitian ini penting karena mengintegrasikan konsep *collaborative governance* dengan ekonomi sirkular dalam konteks kawasan wisata pesisir. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak fokus pada sampah plastik atau pendekatan teknis (Wahyudin, Oetje Subagdja dan Abubakar Iskandar, 2023), penelitian ini secara khusus mengkaji pengelolaan sampah organik dengan menggunakan kerangka *Collaborative Governance Regime* (CGR) dari Emerson secara komprehensif. Kontribusi penelitian ini adalah memperkaya literatur

administrasi publik, khususnya tata kelola kolaboratif di sektor lingkungan, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pengelolaan sampah di kawasan wisata dengan karakteristik serupa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dijadikan rujukan penelitian yaitu bagaimana realisasi *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular di Tanjung Benoa menggunakan kerangka *Collaborative Governance Regime* (CGR) yang mencakup dimensi *system context*, *collaborative governance regime*, dan *impacts and adaptation*.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Adat Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan enam (6) informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, meliputi: Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3 DLHK Kabupaten Badung, Lurah Tanjung Benoa, Bendesa Adat Tanjung Benoa, Ketua Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reused, Recycle* (TPS3R) Panca Lestari, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa laporan resmi, peraturan perundangan, dan literatur ilmiah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci selama periode penelitian berlangsung. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas pengelolaan sampah organik, mulai dari proses pemilahan hingga pemanfaatannya. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1994), meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui teknik credibility dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi sumber serta triangulasi teknik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. *System Context* (Konteks Sistem)**

Kolaborasi dalam pengelolaan sampah organik di Tanjung Benoa tidak terbentuk secara spontan, melainkan muncul sebagai respons terhadap kondisi sistemik yang menciptakan urgensi bersama. Sebagai kawasan wisata bahari dengan karakteristik sosial-ekonomi yang kompleks, Tanjung Benoa menghadapi permasalahan sampah yang unik dan multidimensional. Volume sampah organik yang mencapai 500 kg per hari bersumber dari aktivitas pariwisata, konsumsi rumah tangga, dan upacara keagamaan Hindu yang dilaksanakan setiap hari oleh masyarakat dari empat banjar adat.

<sup>1</sup>Ni Komang Giska Ayu Princia, <sup>2</sup>Ni Wayan Widhiastini, <sup>3</sup>Ni Luh Yulyana Dewi, <sup>4</sup>Ni Putu Bayu Widhi Antari: Implementasi *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Ekonomi Sirkular Di Bali

Monitoring TPS 3R Binaan DLHK Kabupaten Badung

Kepada : Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung  
Perihal : Hasil Pemantauan ke lapangan ( TPS 3R PANCA LESTARI )

Dengan hormat,  
Bername ini disampaikan hasil pemantauan ke lapangan TPS 3R Panca Lestari Desa Adat Tanjung Bena sebagai berikut :  
Hari / tanggal : Kamis, 3 Maret 2025  
Tempat : TPS 3R Panca Lestari  
Acara : Pemantauan TPS 3R Panca Lestari

Hasil Pemantauan :

- 1) Di wilayah Kedoganan memiliki jumlah penduduk ..... jiwa
- 2) Jumlah pelaku usaha yang terdapat di wilayah TPS 3R Panca Lestari sebanyak 24 (Warung, Hotel 2, Villa 1, Home stay 2, Resto 4)
- 3) Jumlah nasabah yang terlayani oleh pihak TPS 3R Panca Lestari sebanyak 1.124 KK dan 118 Pendatang
- 4) Dari 1.242 KK nasabah yang terlayani sudah 80% yang mampu untuk melakukan pemilahan rumah masih belum sempurna.
- 5) Bank sampah di wilayah TPS 3 R Panca Lestari aktif
- 6) Jenis sampah yang terdapat di wilayah TPS 3R Panca Lestari adalah organik 10%, anorganik 10%, residu 79%
- 7) Jumlah tenaga kerja di TPS 3R Panca Lestari 24 Orang (laki-laki :12 perempuan : 12 ) dengan status Karyawan Tetap
- 8) Penanggung jawab TPS 3R Panca Lestari Ni Kodak Suyati
- 9) Sumber dana TPS 3R berasal dari Desa Adat Tanjung Bena dan Iuran Usaha
- 10) TPS 3R Panca Lestari ada mendapat subsidi kepala Warga Gegeran Desa Adat Tanjung Bena
- 11) Alat yang dimiliki TPS 3R Mesin Pencacah 6, Mesin Pengayak 2, Mesin Pres Plastik 1, Mesin MOTAR 1
- 12) Volume sampah masuk 8.174 Kg per hari
- 13) Volume sampah organik 500 Kg per hari
- 14) Volume sampah anorganik 40 Kg per hari
- 15) Volume sampah residu 7.634 Kg per hari
- 16) Jenis penanganan yang dilakukan di TPS 3R adalah
  - Organik diolah menjadi Kompos dan pakan ternak
  - Anorganik diolah menjadi Kertas HVS jadi Kerajinan sisanya di jual ke pihak ketiga
  - Residu di buang ke TPA Serbagita
- 17) Jumlah Kompos yang dihasilkan setiap bulannya 3 Ton dan di distribusikan ke Hotel dan dibeli beberapa oleh warga

Gambar 1. Data Monitoring TPS 3R Binaan DLHK Kabupaten Badung  
Sumber: Dokumentasi TPS3R Panca Lestari

Ketua TPS3R Panca Lestari menjelaskan bahwa tingginya daya beli masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata berdampak langsung pada peningkatan volume sampah, terutama sampah organik dari banten dan canang yang dihasilkan setiap hari. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan geografis sebagai kawasan pesisir yang tidak memiliki lahan memadai untuk tempat pembuangan akhir. Keterbatasan ruang dan ancaman pencemaran ekosistem bahari menciptakan kondisi ketidakpastian (*uncertainty*) yang memaksa seluruh aktor untuk mencari solusi kolektif.

Kerangka regulasi menjadi fondasi legitimasi formal bagi kolaborasi yang terbangun. Sinergi antara Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Instruksi Gubernur Bali Nomor 8324 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, dan Pararem Desa Adat Tanjung Bena Nomor 12/PR/DA-TB/XI/2021 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber menciptakan struktur hukum berjenjang yang mengintegrasikan kebijakan pemerintah dengan sistem hukum adat. Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3 DLHK Kabupaten Badung menegaskan bahwa kebijakan daerah sejalan dengan regulasi provinsi dalam mendorong pengolahan sampah organik menjadi kompos melalui dukungan terhadap TPS3R.

Melalui legitimasi formal ini diperkuat oleh legitimasi kultural melalui pararem yang disusun melalui Sabha Desa. Bendesa Adat Tanjung Bena menjelaskan bahwa pararem lahir dari kebutuhan memperkuat dasar hukum pengelolaan sampah di tingkat desa adat setelah sebelumnya pengelolaan yang dilakukan oleh kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mengalami kegagalan akibat kendala keuangan. Kombinasi legitimasi formal-kultural ini menciptakan basis kepercayaan yang lebih kokoh dibandingkan kolaborasi yang hanya mengandalkan satu sumber legitimasi. Temuan mengenai integrasi regulasi formal dengan sistem hukum adat ini sejalan dengan temuan penelitian (Adnyana, Sulandari dan Astawa, 2023) di Desa Penatih Dangin Puri yang menemukan bahwa implementasi Pergub Bali No. 47 Tahun 2019 memerlukan penguatan di tingkat lokal melalui pararem desa adat. Keunikan di Tanjung Bena terletak pada kemampuan Bendesa Adat untuk

menerjemahkan regulasi provinsi ke dalam aturan adat yang lebih operasional dan memiliki daya ikat kultural lebih kuat dibandingkan regulasi formal semata.

Faktor pendorong (*driver*) paling krusial adalah kepemimpinan transformatif Bendesa Adat yang mengambil inisiatif strategis untuk mengelola sampah secara mandiri dengan layanan gratis bagi masyarakat. Layanan gratis ini lahir dari pemahaman bahwa partisipasi masyarakat tidak akan optimal jika dibebani biaya. Untuk mewujudkannya, Bendesa Adat melakukan inovasi pembiayaan dengan mengubah sistem kontrak lahan wisata bahari dari kontrak 10 tahunan menjadi kerjasama tahunan dengan pembagian 70% untuk pengusaha dan 30% untuk desa adat. Dari 30% inilah dibiayai operasional pengelolaan sampah termasuk subsidi layanan gratis bagi 815 kepala keluarga dari lima banjar.

Kepemimpinan ini tidak hanya bersifat transformasional dalam mendorong perubahan, tetapi juga bersifat mobilisatif dalam menggerakkan partisipasi dan kolaborasi para pemangku kepentingan, di mana Bendesa Adat secara aktif menggerakkan sumber daya, membangun narasi tanggung jawab bersama, dan memberikan komitmen nyata melalui alokasi anggaran desa adat sebesar Rp87 juta per bulan. Insentif konsekuensial berupa layanan gratis ini menjadi katalisator yang mengubah paradigma dari pembiayaan individual menjadi subsidi kolektif, sekaligus menciptakan rasa kepercayaan dan tanggung jawab bersama di kalangan masyarakat.

Kondisi sistemik ini menciptakan interdependensi di mana pemerintah memerlukan partisipasi masyarakat dalam pemilahan, masyarakat memerlukan fasilitas pengolahan, TPS3R memerlukan dukungan pendanaan, dan semua pihak memerlukan koordinasi yang efektif untuk mencapai tujuan bersama. Inovasi pembiayaan melalui transformasi sistem kontrak lahan ini sejalan dengan temuan (Sabarna dan Ramdani, 2025) di Yogyakarta yang mengidentifikasi *leadership* dan *consequential incentives* sebagai *driver* utama kolaborasi. Namun, di Tanjung Benoa, kepemimpinan tidak hanya bersifat mobilisatif tetapi juga inovatif dalam mencari sumber pendanaan alternatif dari potensi lokal, yang membedakannya dari model kolaborasi yang lebih bergantung pada anggaran pemerintah.

## **2. Collaborative Governance Regime (CGR)**

### **A. Collaborative Dynamic**

#### ***Principled Engagement***

Keterlibatan berdasarkan prinsip dalam pengelolaan sampah organik di Tanjung Benoa termanifestasi melalui mekanisme koordinasi formal dan informal yang melibatkan multi-aktor. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ni Kadek suyatni selaku Ketua TPS3R Panca Lestari menegaskan pentingnya keterlibatan kolektif dengan menyatakan bahwa pengelolaan sampah tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, tetapi memerlukan sinergi antara TPS3R, desa adat, pemerintah, dan masyarakat. Pernyataan ini mencerminkan kesadaran akan interdependensi yang menjadi fondasi *principled engagement*.

Koordinasi operasional berjalan melalui mekanisme pelaporan berjenjang dengan frekuensi bulanan, triwulan, dan semesteran kepada DLHK Kabupaten Badung. Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3, Bapak Ir. Anak Agung Gede Agung Dalem ST.,MT menilai komunikasi dan koordinasi dengan TPS3R berjalan dengan baik, ditandai dengan kemudahan akses komunikasi dan keterbukaan informasi. Forum pengambilan keputusan strategis dilakukan melalui Paruman Agung yang melibatkan seluruh krama desa

<sup>1</sup>Ni Komang Giska Ayu Princia, <sup>2</sup>Ni Wayan Widhiastini, <sup>3</sup>Ni Luh Yulyana Dewi, <sup>4</sup>Ni Putu Bayu Widhi Antari: Implementasi *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Ekonomi Sirkular Di Bali

adat, di mana Bendesa Adat menyampaikan laporan pertanggungjawaban program desa adat termasuk pengelolaan sampah. Forum ini juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan.



Gambar 2. Paruman warga banjar di Desa Adat Tanjung Benoa  
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Selain itu, keterlibatan aktor eksternal memperluas cakupan kolaborasi hingga level internasional. TPS3R menjalin kerjasama dengan Seven Clean Seas, organisasi lingkungan yang fokus pada pembersihan sampah laut menggunakan kapal dengan teknologi khusus. Kolaborasi ini tidak hanya bersifat operasional tetapi juga melibatkan pemberdayaan aktor lokal melalui kerjasama dengan Sekaa Teruna (organisasi pemuda adat) di tingkat banjar. Warga yang terlibat dalam kegiatan bersama Seven Clean Seas menjelaskan bahwa Sekaa Teruna di Banjar Purwa Santhi secara aktif melakukan aksi lapangan dan edukasi lingkungan. Keterlibatan generasi muda ini menunjukkan bahwa kolaborasi telah berhasil memberdayakan aktor lokal untuk memperluas jangkauan aksi hingga ke tingkat komunitas.

Namun, penelitian ini menemukan kesenjangan signifikan dalam cakupan keterlibatan aktor, khususnya dari sektor swasta seperti pelaku usaha watersport. Meskipun koordinasi operasional telah berjalan melalui mekanisme pengangkutan sampah oleh truk TPS3R, keterlibatan aktif dalam pemilahan dan pengolahan sampah di rumah masih sangat terbatas. Salah satu pelaku usaha watersport menyatakan bahwa belum ada kerjasama formal, dan kolaborasi baru terbentuk dengan kelompok ibu rumah tangga. Ketua TPS3R menambahkan bahwa pelaku usaha watersport belum mampu mengikuti sistem pemilahan karena wisatawan cenderung membuang sampah secara tercampur meskipun telah disediakan tempat sampah.

Kesenjangan ini kontras dengan temuan (Janah *et al.*, 2025) di IPST ASARI Cilegon yang berhasil membangun keterlibatan sektor swasta melalui perjanjian kerja sama formal (MoU) dengan PT Sarana Utama Welltrash dan Republik Larva. Di Tanjung Benoa, belum adanya MoU formal dengan pelaku usaha *watersport* menyebabkan keterlibatan mereka belum konsisten, menunjukkan perlunya institusionalisasi kemitraan yang lebih terstruktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa *principled engagement* di Tanjung Benoa masih bersifat selektif dan belum mencakup seluruh pemangku kepentingan secara merata. Keterlibatan yang kuat terbangun di kalangan masyarakat adat, pemerintah, dan organisasi lingkungan, sementara sektor bisnis pariwisata masih dalam tahap adaptasi. Kesenjangan ini menjadi

tantangan krusial karena pelaku usaha *watersport* merupakan kontributor signifikan terhadap volume sampah organik di kawasan wisata bahari.

### ***Shared Motivation***

Motivasi bersama dalam kolaborasi pengelolaan sampah organik di Tanjung Benoa dibangun melalui kombinasi kepercayaan (*mutual trust*), saling ketergantungan (*interdependence*), dan komitmen yang diwujudkan dalam bentuk dukungan finansial dan partisipasi aktif. Komitmen Desa Adat yang mengalokasikan Rp87 juta per bulan untuk subsidi layanan gratis mencerminkan motivasi yang kuat terhadap keberhasilan pengelolaan sampah. Komitmen ini memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa desa adat serius dalam menangani permasalahan sampah, bukan sekadar retorika kebijakan. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola menguat seiring dengan transparansi pelaporan melalui Paruman Agung dan keberhasilan memperoleh penghargaan Adipura.

Bendesa Adat Tanjung Benoa, Bapak I Made Wijaya, S.E menjelaskan bahwa masyarakat kini merasakan dampak langsung dari pengelolaan sampah berbasis kolaboratif, di mana layanan yang sebelumnya berbayar Rp50.000 kini dapat diakses secara gratis. Keberhasilan ini menciptakan optimisme masyarakat dan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program pengelolaan sampah. Legitimasi internal diperkuat oleh dua sumber yang saling melengkapi yaitu legitimasi formal dari pemerintah melalui hibah operasional dan bantuan sarana prasarana, serta legitimasi kultural dari sistem adat melalui pararem.

Bapak I Wayan Suidiana, S.H., M.H selaku Lurah Tanjung Benoa menjelaskan bahwa koordinasi pengelolaan sampah diserahkan kepada Bendesa Adat dan TPS3R, mencerminkan kepercayaan pemerintah kelurahan terhadap kapasitas desa adat. Kombinasi legitimasi ini menciptakan basis kepercayaan yang lebih kokoh dan mengurangi resistensi masyarakat terhadap program yang dijalankan. Kombinasi legitimasi formal-kultural ini sejalan dengan temuan (Richo dan Widhiasthini, 2022) di Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur Bukit Payang yang menemukan bahwa legitimasi internal dari berbagai sumber memperkuat kepercayaan antaraktor. Di Tanjung Benoa, legitimasi ini menciptakan fondasi motivasi yang lebih kokoh karena masyarakat tidak hanya merasa terikat oleh aturan formal pemerintah tetapi juga oleh kewajiban adat yang memiliki dimensi spiritual dan sosial.

Namun, dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa *shared motivation* belum sepenuhnya merata di seluruh aktor. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah masih fluktuatif, terutama ketika menghadapi kesibukan atau aktivitas rumah tangga yang padat. Seorang informan dari masyarakat menjelaskan bahwa keragaman profesi warga mulai dari dokter, pekerja pantai, hingga guru yang menyita banyak waktu sehingga memengaruhi konsistensi pemilahan sampah. Selain itu, kesadaran (*awareness*) masyarakat tentang urgensi pengelolaan sampah belum sepenuhnya terbentuk, sehingga belum semua warga memahami bahwa tanpa pemilahan optimal, mereka dapat tertimbun sampah sendiri di masa depan.

<sup>1</sup>Ni Komang Giska Ayu Princia, <sup>2</sup>Ni Wayan Widhiastini, <sup>3</sup>Ni Luh Yulyana Dewi, <sup>4</sup>Ni Putu Bayu Widhi Antari: Implementasi *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Ekonomi Sirkular Di Bali



Gambar 3. Sampah yang tidak terkelola  
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan pada observasi lapangan, memperkuat temuan ini di mana masih ditemukan sampah yang dicampur dalam satu kantong plastik tanpa pemilahan antara organik dan anorganik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun aturan telah ditetapkan melalui pararem, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala dari segi kedisiplinan, pemahaman, dan kebiasaan yang belum sepenuhnya berubah. Pelaku usaha watersport juga belum menunjukkan motivasi yang konsisten dalam menerapkan pemilahan sampah, lebih karena kurangnya pengawasan dan insentif yang jelas.

Fenomena ini menunjukkan bahwa *mutual understanding* tidak selalu berkembang secara merata di semua level. Meskipun para pemimpin dan pengelola memiliki pemahaman yang jelas tentang pentingnya pengelolaan sampah organik, pemahaman ini belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam praktik sehari-hari oleh semua anggota masyarakat dan pelaku usaha. Internalisasi nilai-nilai kolaboratif di tingkat individu dan organisasi masih memerlukan penguatan melalui edukasi, pengawasan, dan insentif yang lebih intensif dan konsisten.

### ***Capacity for Joint Action***

Kapasitas untuk bertindak bersama (*Capacity for Joint Action*) dalam pengelolaan sampah organik di Tanjung Benoa menunjukkan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya yang memadai, meskipun belum dioptimalkan secara maksimal. Keberadaan TPS3R Panca Lestari dengan kapasitas pengolahan 1,2 ton per hari menjadi simpul operasional kolaborasi. Dukungan pemerintah daerah sangat signifikan, di mana Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3 menjelaskan bahwa pemerintah memberikan hibah dana operasional sekitar Rp4 miliar untuk biaya gaji, bahan bakar, dan operasional lainnya, serta bantuan sarana prasarana.

Pararem Desa Adat memberikan legitimasi sosial yang kuat dengan mengatur kewajiban pemilahan sampah dan mekanisme pengelolaan. Struktur organisasi TPS3R yang melibatkan 14 anggota Kelompok Pengolah Pupuk (KPP) dan 24 operator menunjukkan pembagian peran yang jelas dalam operasional pengelolaan sampah. Armada pengangkutan sampah beroperasi secara rutin mengumpulkan sampah dari rumah tangga dan pelaku usaha, menciptakan sistem logistik yang terorganisir.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada penelitian ini, peneliti menemukan sejumlah keterbatasan dalam *capacity for joint action* yang menghambat optimalisasi kolaborasi. Pertama, keterbatasan lahan menjadi kendala struktural yang signifikan. Dengan luas area hanya 654 m<sup>2</sup>, TPS3R menghadapi kesulitan untuk mengembangkan fasilitas pengolahan lanjutan. Ketua TPS3R menjelaskan bahwa keterbatasan lahan membuat pengolahan kompos secara partisipatif bersama masyarakat tidak dapat dilakukan, karena kondisi Tanjung Benoa yang padat penduduk dengan lahan rumah tangga yang sempit. Kondisi ini memaksa TPS3R menjadi satu-satunya pusat pengolahan sampah organik, meningkatkan beban operasional dan ketergantungan pada kapasitas terpusat.



Gambar 4. Tahapan pencacahan sampah organik  
Sumber: Dokumentasi TPS3R Panca Lestari

Kedua, kapasitas pengolahan yang hanya mencapai 76,7% dari total 815 kepala keluarga menunjukkan bahwa infrastruktur yang ada belum mampu melayani seluruh masyarakat secara optimal. Ketiga, armada pengangkutan yang sudah tua memerlukan biaya perawatan tinggi dan sering mengalami gangguan operasional. Keempat, keterbatasan pengetahuan teknologi menjadi hambatan dalam pengembangan pengolahan lanjutan seperti budidaya maggot, biogas, atau *eco-enzyme* yang dapat meningkatkan nilai ekonomi sampah organik. Keterbatasan teknologi ini tidak serupa dengan praktik di TPS 3R Baratan Jember yang diteliti oleh (Pamungkas, Masqurin dan Sutomo, 2024) dimana integrasi budidaya maggot mampu menghasilkan pendapatan Rp75-105 juta per bulan dari penjualan produk maggot. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun Tanjung Benoa memiliki kepemimpinan yang kuat dan komitmen finansial besar, keterbatasan pengetahuan teknologi menjadi hambatan dalam mengoptimalkan prinsip ekonomi sirkular tahap lanjut.

Biaya operasional yang tinggi menjadi tantangan berkelanjutan meskipun telah ada subsidi dari desa adat dan hibah pemerintah. Ketergantungan pada dukungan finansial eksternal membuat keberlanjutan program rentan terhadap fluktuasi kebijakan atau anggaran. Meskipun demikian, kepemimpinan Bendesa Adat yang kuat menjadi kompensasi penting terhadap keterbatasan infrastruktur dan teknologi, di mana komitmen menyediakan layanan gratis mempertahankan partisipasi masyarakat meskipun kapasitas operasional terbatas.

Keterbatasan kapasitas ini juga terlihat dalam koordinasi dengan pelaku usaha watersport yang belum terintegrasi secara optimal. Belum adanya perjanjian kerja sama formal (MoU) dengan sektor swasta membuat keterlibatan swasta tidak memiliki kepastian maupun konsistensi. Lurah Tanjung Benoa menjelaskan bahwa koordinasi teknis pengelolaan sampah diserahkan sepenuhnya kepada Bendesa Adat dan TPS3R, tanpa keterlibatan langsung pemerintah kelurahan dalam pengawasan sektor usaha. Kondisi ini menciptakan gap dalam *network institutionalization* di mana tidak semua aktor memiliki keterikatan struktural yang jelas dalam sistem kolaborasi.

## **B. Collaborative Action**

Tindakan kolaboratif atau *Collaborative Action* berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi menunjukkan implementasi prinsip ekonomi sirkular, meskipun masih dalam tahap awal dan terbatas pada aspek pengolahan dasar. Bentuk implementasi kolaborasi mencakup beberapa kegiatan yang saling terkait dan melibatkan berbagai aktor dengan peran spesifik. Pertama, pemilahan sampah di tingkat rumah tangga menjadi *entry point* kolaborasi. Masyarakat dari lima banjar (4 banjar adat dan 1 banjar Islam) diwajibkan memilah sampah dari rumah masing-masing dan membawa sampah terpilah ke TPS3R untuk mendapatkan layanan gratis. Mekanisme ini menerapkan prinsip *refuse* dan *reduce* dalam kerangka ekonomi sirkular, di mana sampah dikurangi dan dikelola dari sumber yaitu rumah tangga. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena tidak semua masyarakat konsisten melakukan pemilahan, terutama ketika menghadapi kesibukan atau kegiatan adat.

Kedua, pengolahan sampah organik di TPS3R Panca Lestari menjadi simpul operasional kolaborasi. Sampah organik, terutama canang hasil pemilahan rumah tangga, diolah menjadi kompos melalui proses pencacahan dan pengomposan. Bendesa Adat menjelaskan bahwa TPS3R memproduksi kompos dari sampah canang yang terkumpul, di mana kualitas terbaik pupuk berasal dari canang yang tidak tercampur dengan sampah lain. Proses ini mencerminkan penerapan prinsip *recycle* dan *regenerate nature* dari kerangka ekonomi sirkular, di mana sampah organik dikembalikan ke alam sebagai pupuk.

Ketiga, pembersihan sampah laut oleh Seven Clean Seas memperluas cakupan kolaborasi hingga ekosistem bahari. Penggunaan kapal dengan teknologi khusus untuk membersihkan sampah di laut menunjukkan integrasi antara pengelolaan sampah darat dan laut. Kolaborasi ini sangat relevan untuk kawasan wisata bahari seperti Tanjung Benoa, di mana sampah kiriman dari laut terutama sarah dan rumput laut menjadi permasalahan signifikan. Dengan adanya keterlibatan Sekaa Teruna dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak hanya digerakkan dari tingkat lembaga pemerintah saja, tetapi juga melibatkan komunitas lokal.

Keempat, edukasi, sosialisasi, dan aksi menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran dan kapasitas masyarakat. Ketua TPS3R menjelaskan bahwa berbagai kelompok seperti PKK, anak-anak sekolah (TK, SD, SMP), Karang Taruna, dan Sekaa Teruna secara rutin berkunjung ke TPS3R untuk belajar tentang proses pemilahan dan pembuatan kompos. Proses edukasi ini mengubah persepsi masyarakat bahwa sampah yang sebelumnya dianggap jijik dan tidak bernilai dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat. Edukasi juga dilakukan melalui Paruman Agung dan sosialisasi di tingkat banjar untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya pemilahan sampah.

Kelima, dukungan pemerintah tidak hanya dalam bentuk regulasi tetapi juga hibah operasional dan bantuan sarana prasarana. Hibah sebesar Rp4 miliar per tahun untuk biaya operasional dan gaji menjadi fondasi finansial yang menjaga keberlanjutan operasional TPS3R. Pemerintah juga memfasilitasi koordinasi dan pelaporan rutin untuk memantau kinerja pengelolaan sampah. Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3 menegaskan bahwa dukungan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap pengelolaan sampah berbasis sumber sesuai dengan kebijakan provinsi.

Namun, berdasarkan hasil triangulasi data implementasi kolaborasi ini belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan prinsip ekonomi sirkular secara komprehensif. Tindakan kolaboratif masih terbatas pada aspek pengolahan dasar (*recycle*) dan belum mencakup prinsip-prinsip lanjutan seperti *repurpose*, *remanufacture*, atau *recovery*. Pemanfaatan kompos yang dihasilkan masih terbatas, dipasarkan secara lokal tanpa sistem distribusi dan branding yang kuat. Harga jual kompos juga belum mampu bersaing dengan pupuk kimia yang lebih praktis digunakan, sehingga prinsip *circulate products and materials* belum sepenuhnya terwujud.

Keterbatasan ini sejalan dengan temuan (Muliarta, 2023) yang menyimpulkan bahwa implementasi ekonomi sirkular di Bali masih dalam tahap transisi dari model linier menuju sistem regeneratif. Di Tanjung Benoa, transisi ini terhambat tidak hanya oleh keterbatasan teknologi tetapi juga oleh belum optimalnya sistem pemasaran dan pengembangan produk turunan yang dapat meningkatkan nilai ekonomi sampah organik.

Ketidakterlibatan optimal pelaku usaha *watersport* juga menghambat efektivitas kolaborasi. Meskipun telah ada mekanisme pengangkutan sampah oleh truk TPS3R dari lokasi usaha, hubungan ini lebih bersifat operasional rutin tanpa keterlibatan aktif dalam pemilahan atau pengurangan sampah di lokasi usaha *watersport*. Kondisi ini menciptakan kesenjangan dalam *collaborative action* di mana tidak semua aktor berkontribusi secara proporsional terhadap tujuan bersama. Kurangnya pengawasan dan insentif membuat pelaku usaha belum merasa memiliki tanggung jawab yang sama dengan masyarakat adat dalam pengelolaan sampah.

### 3. *Impact And Adaptation*

#### **Dampak Kolaborasi**

Kolaborasi dalam pengelolaan sampah organik di Tanjung Benoa telah menghasilkan dampak positif dalam berbagai aspek, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam pencapaian nilai ekonomi sirkular secara penuh. Dari aspek lingkungan, keberhasilan paling menonjol adalah peningkatan kebersihan lingkungan dan pengurangan timbulan sampah yang dibuang ke TPA. Bendesa Adat menjelaskan bahwa kini masyarakat tidak lagi melihat sampah berserakan, lingkungan menjadi lebih bersih, nyaman, dan tidak mengganggu pemandangan sebagai destinasi pariwisata. Keberhasilan ini diakui secara eksternal melalui perolehan penghargaan Adipura, yang menjadi simbol pengakuan atas keberhasilan kolaborasi sekaligus memperkuat legitimasi internal dan motivasi bersama.

Salah satu informan dari masyarakat menegaskan bahwa TPS3R Tanjung Benoa sempat mendapat penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup secara nasional karena pengolahan sampah yang baik, meskipun dampak perubahan di tingkat masyarakat belum terlalu masif. Perolehan penghargaan ini menciptakan rasa kebanggaan kolektif dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas sistem pengelolaan yang dijalankan. Peningkatan kesadaran lingkungan juga terlihat dari partisipasi aktif berbagai kelompok dalam kegiatan edukasi dan pemilahan sampah, menunjukkan bahwa kolaborasi tidak hanya menghasilkan dampak teknis tetapi juga transformasi budaya lingkungan.

Dari aspek ekonomi, masyarakat merasakan manfaat langsung berupa penghematan biaya pembuangan sampah. Bendesa Adat menjelaskan bahwa warga yang sebelumnya harus mengeluarkan Rp50.000 untuk pembuangan sampah kini mendapat layanan gratis karena

adanya subsidi dari potensi desa adat dan hibah pemerintah. Kebijakan ini menciptakan keadilan ekonomi di mana beban biaya dialihkan dari masyarakat adat kepada penduduk pendatang dan pelaku usaha yang membayar jasa pengangkutan. Seorang pelaku usaha watersport menyatakan bahwa keberadaan TPS3R mempermudah masyarakat dalam membuang sampah dengan cara yang lebih baik, dan biaya ditanggung oleh desa adat sehingga masyarakat lokal tidak dibebani.

Namun, dampak ekonomi dari prinsip ekonomi sirkular belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat dalam bentuk *income*. Informan dari masyarakat menjelaskan bahwa meskipun *outcome* berupa sistem pengolahan sampah sudah berdampak karena mengurangi biaya pembuangan, *income* dari hasil pengolahan seperti kompos belum ada sistemnya. Kompos yang dihasilkan TPS3R masih dipasarkan secara terbatas di lingkungan lokal tanpa sistem distribusi dan branding yang kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip *recycle* telah diterapkan dalam aspek teknis pengolahan, pemanfaatan nilai ekonomis belum optimal karena produk hasil daur ulang belum memiliki nilai ekonomi yang kompetitif di pasar.

Kondisi ini sejalan dengan temuan (Zaenudin dan Astuti, 2025) di Kota Bogor yang mengidentifikasi keterbatasan pemasaran produk hasil pengolahan sebagai hambatan dalam mewujudkan ekonomi sirkular berkelanjutan. Temuan ini berbeda dengan penelitian oleh (Pamungkas, Masqurin dan Sutomo, 2024) yang menemukan keberhasilan TPS 3R Baratan dalam menghasilkan pendapatan signifikan menunjukkan bahwa Tanjung Benoa memerlukan strategi pengembangan pasar dan diversifikasi produk yang lebih agresif.

Keterbatasan lahan menjadi hambatan struktural dalam pengembangan ekonomi sirkular secara partisipatif. Ketua TPS3R menjelaskan bahwa pengolahan kompos secara bersama dengan masyarakat belum dapat dilakukan karena kondisi Tanjung Benoa yang padat penduduk dengan lahan rumah tangga yang sempit. Meskipun demikian, TPS3R berperan sebagai pusat pengolahan dan produksi kompos serta sebagai titik integrasi kolaborasi antara warga, desa adat, dan pemerintah. Proses edukasi yang melibatkan PKK, anak-anak sekolah, Karang Taruna, dan Sekaa Teruna/Teruni (organisasi pemuda/i banjar desa adat) menunjukkan bahwa *outcome* berupa peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat sudah terlihat, meskipun *income* ekonomi belum dirasakan.

Dari aspek sosial, dampak positif terlihat dari peningkatan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan penguatan kohesi sosial melalui partisipasi dalam pengelolaan sampah. Bendesa Adat menyatakan bahwa masyarakat kini memiliki optimisme dan merasakan manfaat langsung dari pengelolaan TPS3R, sehingga permasalahan sampah dapat tuntas dan tidak lagi seperti dulu ketika sampah tidak ada yang mengambil. Proses kolaborasi juga memperkuat peran kelembagaan adat dalam memberikan pelayanan lingkungan kepada warganya, meningkatkan legitimasi desa adat sebagai institusi yang mampu menyelesaikan permasalahan publik. Dampak positif ini sejalan dengan temuan (Widyastuti, 2025) di TPS Go-Sari Bantul yang menemukan bahwa meskipun partisipasi masyarakat masih rendah, proses edukasi melalui berbagai kelompok masyarakat telah meningkatkan kesadaran lingkungan. Di Tanjung Benoa, keterlibatan PKK, sekolah, dan Sekaa Teruna menunjukkan bahwa *outcome* berupa perubahan perilaku dan budaya dapat tercapai meski *income* ekonomi belum dirasakan langsung.

Berdasarkan hasil triangulasi, penelitian ini menemukan bahwa dampak sosial belum merata di seluruh segmen masyarakat. Pelaku usaha watersport dan wisatawan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem kolaborasi, sehingga kesadaran lingkungan di sektor pariwisata masih terbatas. Ketua TPS3R menjelaskan bahwa pelaku usaha watersport masih belum mengikuti sistem pemilahan karena wisatawan cenderung membuang sampah secara tercampur. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kolaborasi telah menghasilkan dampak positif di kalangan masyarakat adat, transformasi perilaku di sektor bisnis pariwisata masih memerlukan intervensi yang lebih intensif.

### **Kemampuan Adaptasi**

Kemampuan adaptasi kolaborasi menunjukkan respons yang dinamis terhadap berbagai tantangan operasional dan struktural. Desa Adat terus menyesuaikan strategi pembiayaan melalui diversifikasi sumber pendanaan dari potensi desa adat, hibah APBD, dan iuran pelanggan. Adaptasi paling menonjol terlihat dari inovasi Bendesa Adat dalam mengatasi keterbatasan anggaran melalui transformasi sistem kontrak lahan wisata bahari. Perubahan dari kontrak 10 tahunan menjadi sistem kerjasama tahunan dengan pembagian 70% untuk pengusaha dan 30% untuk desa adat menunjukkan kemampuan manajerial dalam mengelola sumber daya yang terbatas untuk mendukung program pengelolaan sampah.

TPS3R juga melakukan adaptasi operasional dalam mengoptimalkan pengolahan sampah meskipun dengan keterbatasan lahan dan teknologi. Fokus pada pengolahan sampah canang menjadi kompos berkualitas tinggi merupakan strategi adaptif untuk memaksimalkan nilai produk dengan sumber daya yang terbatas. Ketua TPS3R menjelaskan bahwa edukasi masyarakat melalui kunjungan berbagai kelompok ke TPS3R menjadi strategi adaptif untuk membangun kesadaran dan partisipasi meskipun pengolahan kompos secara partisipatif tidak dapat dilakukan karena keterbatasan lahan.

Pemerintah menunjukkan adaptasi dalam bentuk dukungan berkelanjutan melalui hibah operasional dan bantuan sarana prasarana. Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3 menegaskan bahwa dukungan pemerintah terus disesuaikan dengan kebutuhan operasional TPS3R, menunjukkan fleksibilitas kebijakan dalam merespons dinamika lapangan. Koordinasi rutin melalui pelaporan bulanan, dan triwulan juga menjadi mekanisme adaptif untuk mengidentifikasi kendala dan menyesuaikan strategi pengelolaan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menemukan bahwa kemampuan adaptasi masih menghadapi kendala struktural, terutama terkait dengan fluktuasi partisipasi masyarakat dan keterbatasan koordinasi dengan sektor swasta. Lurah Tanjung Benoa menyatakan bahwa meskipun pemilahan sampah telah dilakukan oleh sebagian masyarakat, masih ada warga yang acuh tak acuh membuang sampah sembarangan di jalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa adaptasi perilaku di tingkat individu belum sepenuhnya terjadi, sehingga memerlukan intervensi berkelanjutan melalui edukasi, sosialisasi, dan pengawasan yang lebih intensif.

Adaptasi terhadap ketidakterlibatan pelaku usaha *watersport* juga belum optimal. Tidak adanya mekanisme formal yang mengatur kewajiban pelaku usaha dalam sistem pemilahan atau pengangkutan sampah membuat adaptasi hanya bersifat reaktif melalui mekanisme pengangkutan rutin tanpa perubahan perilaku di sumber. Keterbatasan ini berbeda dengan temuan (Janah *et al.*, 2025) yang menemukan kolaborasi terstruktur melalui MoU formal

dengan sektor swasta di IPST ASARI. Ketua TPS3R menjelaskan bahwa pelaku usaha *watersport* masih belum mampu mengikuti sistem pemilahan karena wisatawan membuang sampah secara tercampur, menunjukkan bahwa adaptasi yang dilakukan TPS3R dengan tetap melayani pengangkutan sampah dari area usaha lebih merupakan respons pragmatis dibanding solusi transformatif. Perbedaan ini menunjukkan bahwa di Tanjung Bena, formalisasi kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata masih menjadi agenda yang perlu diprioritaskan untuk memperkuat keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan sampah.

Kemampuan adaptasi yang paling lemah terlihat dalam pengembangan pemasaran dan branding produk kompos. Meskipun telah diproduksi secara konsisten, kompos belum memiliki sistem distribusi yang luas dan branding yang kuat untuk bersaing dengan pupuk kimia. Informan dari masyarakat menjelaskan bahwa dampak terhadap pariwisata seharusnya dapat dilirik lebih jauh, namun belum ada sistem yang mengatur keterkaitan antara pengelolaan sampah dengan sektor pariwisata secara ekonomis. Situasi itu menandakan bahwa adaptasi masih terbatas dalam aspek operasional teknis dan belum diarahkan pada strategi penguatan pasar maupun peningkatan nilai tambah ekonomi.

## SIMPULAN

Realisasi *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular di Tanjung Bena menunjukkan dinamika dalam implementasi kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kolaborasi terbentuk didorong oleh *system context* yang kondusif meliputi regulasi berjenjang, kepemimpinan transformatif Bendesa Adat, dan insentif layanan gratis. Dalam dimensi CGR, *principled engagement* terwujud melalui koordinasi formal dan Paruman Agung yang demokratis, meskipun keterlibatan pelaku usaha *watersport* masih terbatas. *Shared motivation* terbentuk di tingkat kelembagaan melalui subsidi Desa Adat dan kepercayaan masyarakat, namun internalisasi nilai individu masih fluktuatif. *Capacity for joint action* tersedia melalui infrastruktur TPS3R dan hibah DLHK, tetapi terkendala keterbatasan lahan, armada, dan cakupan layanan. Dampak positif meliputi berkurangnya timbulan sampah ke TPA, penghematan biaya masyarakat, dan peningkatan kesadaran lingkungan. Namun, dampak ekonomi sirkular belum dirasakan langsung karena kompos dipasarkan terbatas tanpa sistem distribusi dan branding kuat. Kemampuan adaptasi responsif melalui diversifikasi pendanaan dan inovasi pengolahan, meskipun masih menghadapi kendala fluktuasi partisipasi masyarakat dan koordinasi terbatas dengan sektor swasta. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan edukasi berkelanjutan, pengembangan sistem pemasaran produk kompos, dan pembangunan kemitraan formal dengan sektor swasta untuk memperkuat *collaborative governance* yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, Y., Sulandari, S. dan Astawa, I. (2023) "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber," *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(1), hal. 57–64.
- CNN Indonesia (2024) *Bali Masuk Tempat Wisata yang Tak Layak Dikunjungi di 2025*. Tersedia pada: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20241123055643-269->

- 1169762/bali-masuk-tempat-wisata-yang-tak-layak-dikunjungi-di-2025.
- Emerson, K., Nabatchi, T. dan Balogh, S. (2012) “An integrative framework for collaborative governance,” *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), hal. 1–29. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>.
- Haryanti, N. (2023) *Indonesia merupakan negara penyumbang sampah makanan terbesar di ASEAN*, INFID. Tersedia pada: <https://infid.org/en/indonesia-penyumbang-sampah-makanan-terbanyak-se-asean/>.
- Janah, S. et al. (2025) “Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Plastik Berbasis Ekonomi Sirkular Di Industri Pengelolaan Sampah Terpadu Atasi Sampah Mandiri (IPST ASARI),” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(1), hal. 65–81. Tersedia pada: <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i1.507>.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2024) *Komposisi Sampah, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional*. Tersedia pada: <https://sipsn.kemenvh.go.id/sipsn/public/data/komposisi>.
- Muliarta, I.N. (2023) “The Concept of Circular Economy in the Implementation of Source-Based Waste Management in Bali,” *Indonesian Journal of Agriculture and Environmental Analytics*, 2(2), hal. 125–132. Tersedia pada: <https://doi.org/10.55927/ijaea.v2i2.5456>.
- Pamungkas, T.S., Masqurin, S.N. dan Sutomo, S. (2024) “Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jember,” *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), hal. 905–914. Tersedia pada: <https://doi.org/10.54082/jupin.378>.
- Pemerintah Provinsi Bali (2021) *Pararem Desa Adat Tanjung Benoa Nomor: 12/PR/DA-TB/XI/TAHUN 2021*.
- Peraturan Gubernur Bali (2019) “Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber,” hal. 1–16.
- Peraturan Gubernur Bali (2021) “Instruksi Gubernur Bali Nomor 8324 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat,” hal. 1–4.
- Richo, T. dan Widhiasthini, W. (2022) “Implementasi Collaborative Governance Pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur Bukit Payang Kintamani Bangli,” *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), hal. 269–282. Tersedia pada: <https://doi.org/10.14710/dialogue.v4i1.14201>.
- Sabarna, M.A.N. dan Ramdani, R. (2025) “Collaborative governance in waste management: a case study in the municipality of Yogyakarta, Indonesia,” *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), hal. 33–45.
- Valentina, T.R. et al. (2025) *Waste Management Crisis and Collaborative Governance in Indonesia: Enhancing Public Participation for Effective Urban Waste Solutions*. Atlantis Press SARL. Tersedia pada: [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-436-5\\_19](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-436-5_19).
- Wahyudin, C., Oetje Subagdja dan Abubakar Iskandar (2023) “Desain Model Collaborative Governance Dalam Penanganan Pengurangan Penggunaan Plastik,” *Jurnal Governansi*, 9(2), hal. 151–162. Tersedia pada: <https://doi.org/10.30997/jgs.v9i2.8004>.
- Widyastuti, A.E.S. (2025) “Pentingnya Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah: Studi Kasus Mekanisme Pengelolaan Sampah Berbasis Zero Waste di TPS Go-Sari dan TPA BLE Banyumas,” *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), hal. 3163–3176. Tersedia pada: <https://ulilalbabainstitute.co.id/index.php/J-CEKI/article/view/8813>.
- Zaenudin dan Astuti, R.S. (2025) “Dinamika Kolaborasi Dalam Penanganan Sampah Di Kota Bogor.”